

## **Analisis Faktor Yang Memiliki Pengaruh Besar Terhadap Penetapan Upah Di Karesidenan Semarang**

**Jihan Luthfiyah Rahmah<sup>1\*</sup>, Siti Fatimah Nurhayati<sup>1</sup>**

<sup>1,2</sup> Ekonomi Pembangunan / Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

✉ b300200279@student.ums.ac.id

### **Abstrak**

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang merupakan cerminan dari tingkat upah yang diterima para tenaga kerja. Standar minimum yang digunakan para pelaku industri atau pengusaha dalam memberikan upah kepada para pekerja adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh pemerintah pada suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Upah Minimum Kabupaten/Kota di Karesidenan Semarang memiliki nilai yang tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Karesidenan Semarang tahun 2017-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah menggunakan analisis regresi data panel dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) menggunakan software *E-Views*. Hasil penelitian berdasarkan uji chow dan uji hausman menunjukkan bahwa model yang paling tepat yaitu *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan hasil uji *t* menunjukkan bahwa: 1) Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota; 2) Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota; 3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota; 4) PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota. Secara simultan atau bersama-sama Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota. Kontribusi seluruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat yaitu sebesar 97,45%. Sisanya sebesar 2,55% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota di karesidenan Semarang dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan PDRB per kapita. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi edukasi tentang beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap penetapan upah minimum kabupaten/kota di karesidenan Semarang tahun 2017-2022.

### **Kata Kunci:**

Upah Minimum Kabupaten/Kota, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia,, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, PDRB per kapita

### **Abstract**

*The success of economic development in a country can be seen from the degree of community welfare, which is a reflection of the level of wages received by workers. The*

*minimum standard used by entrepreneurs or employers in providing wages to workers is the Regency Minimum Wage set by the government in a region within a certain period. The Regency Minimum Wage in Karesidenan Semarang have a high value compared to other regions in Central Java. Therefore, this study aims to analyze the factors that have a major influence on the determination of the Regency Minimum Wage in Karesidenan Semarang in 2017-2022. This study uses secondary data sourced from the Badan Pusat Statistik (BPS) and processed using panel data regression analysis with the Ordinary Least Square (OLS) method using E-Views software. The results of the study based on the chow and hausman test show that the most appropriate model is the Fixed Effect Model (FEM). Based on the t test results, it shows that: 1) Human Development Index has a positive and significant effect on District Minimum Wage; 2) The Open Unemployment Rate has a positive and significant effect on the District Minimum Wage; 3) Labor Force Participation Rate has a negative and significant effect on the District Minimum Wage; 4) Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita has a positive and significant effect on the District Minimum Wage. Simultaneously or jointly, the Human Development Index, Open Unemployment Rate (TPT), Labor Force Participation Rate (TPAK), and Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita have a significant effect on the District Minimum Wage. The contribution of all independent variables in explaining the dependent variable is 97.45%. The remaining 2.55% is explained by other variables outside the model. Thus it can be concluded that the minimum wage of the Karesidenan Semarang is influenced by the Human Development Index, Open Unemployment Rate, Labor Force Participation Rate, and Gross Regional Domestic Product per capita. This study is intended to educate readers about a number of variables that would affect the Karesidenan Semarang's district minimum wage from 2017 to 2022.*

**Keywords:**

*Regency Minimum Wage, Open Unemployment Rate, Human Development Index, Labor Force Participation Rate, and Gross Regional Domestic Product*

## **PENDAHULUAN**

Ketenagakerjaan menjadi salah satu isu mendasar yang memerlukan perhatian pemerintah suatu negara karena merupakan tantangan esensial yang dihadapi oleh semua negara. Permasalahan ketenagakerjaan memiliki sifat serta dimensi yang kompleks karena tidak hanya memengaruhi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan pola hubungan yang rumit (Collyn & Suriyanto, 2021). Ketenagakerjaan berasal dari kata tenaga kerja, dalam Undang-Undang Pasal 1 angka 2 no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan didefinisikan tenaga kerja sebagai individu yang mempunyai kapabilitas untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa, baik untuk kepentingan pribadi maupun masyarakat. Tenaga kerja adalah seseorang yang berperan penting dalam proses produksi sehingga berhak menerima imbalan berupa upah atas jasa yang diberikan. Dalam penentuan efisiensi pasar tenaga kerja, upah menjadi salah satu faktor penentu dimana ketika upah buruh semakin rendah maka semakin besar kontribusi dalam menurunkan biaya produksi (Sari, 2013).

Tenaga kerja memiliki kaitan erat dengan kebijakan upah minimum (Wihastuti Latri, 2018). Upah menjadi isu utama yang selalu menjadi perhatian utama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, apalagi dengan situasi perburuhan yang semakin kompleks dan dinamis (Riyani & Citra, 2020). Dalam peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi

No. 7 tahun 2013 menjelaskan bahwa upah minimum adalah standar tingkat upah bulanan terkecil yang terdiri dari upah dasar dan tunjangan tetap. Upah Minimum Kabupaten/Kota disingkat UMK adalah upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota dan ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman (Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, n.d.)

Penetapan upah minum masih menimbulkan kompleksitas di setiap daerah, karena hal tersebut merupakan kebutuhan esensial bagi pekerja serta berperan penting dalam perkembangan produktivitas dan daya saing perusahaan serta perekonomian. Upah minimum kabupaten/kota (UMK) ditetapkan oleh gubernur berdasarkan usulan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dengan pertimbangan kesejahteraan pekerja serta keadaan ekonomi daerah yang bersangkutan dan unsurnya tripartit yaitu pengusaha, pemerintah, serikat buruh/serikat pekerja ditambah perguruan tinggi dan pakar (Sari, 2013). Tingkat upah minimum di Indonesia memiliki berbagai macam kebijakan berbeda di setiap kabupaten/kota. Upah memiliki pengaruh bagi perusahaan dalam mempengaruhi tingkat harga, yang akan berakibat pada perluasan dan pemerataan kesempatan kerja.

**Tabel 1.** Tabel Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017-2022

Kabupaten /Kota.	Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Rupiah)					
	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Kabupaten						
Cilacap	2.230.731	2.228.904	2.228.904	2.228.904	2.228.904	2.228.904
Banyumas	1.983.261	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
Purbalingga	1.996.814	1.988.000	1.988.000	1.988.000	1.988.000	1.988.000
Banjarnegara	1.819.835	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000
Purworejo	1.906.781	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000
Kebumen	1.911.850	1.905.400	1.905.400	1.905.400	1.905.400	1.905.400
Wonosobo	1.931.285	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
Magelang	2.081.807	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000
Boyolali	2.010.299	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Klaten	2.015.623	2.011.515	2.011.515	2.011.515	2.011.515	2.011.515
Sukoharjo	1.998.153	1.986.450	1.986.450	1.986.450	1.986.450	1.986.450
Wonogiri	1.839.043	1.827.000	1.827.000	1.827.000	1.827.000	1.827.000
Karanganyar	2.064.313	2.054.040	2.054.040	2.054.040	2.054.040	2.054.040
Sragen	1.839.429	1.829.500	1.829.500	1.829.500	1.829.500	1.829.500
Grobogan	1.894.032	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
Blora	1.904.196	1.894.000	1.894.000	1.894.000	1.894.000	1.894.000
Rembang	1.874.322	1.861.000	1.861.000	1.861.000	1.861.000	1.861.000

Pati	1.968.339	1.953.000	1.953.000	1.953.000	1.953.000	1.953.000
Kudus	2.293.058	2.290.995	2.290.995	2.290.995	2.290.995	2.290.995
Jejara	2.108.403	2.107.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000
Demak	2.513.005	2.511.526	2.511.526	2.511.526	2.511.526	2.511.526
Semarang	2.311.254	2.302.798	2.302.798	2.302.798	2.302.798	2.302.798
Temanggung	1.887.832	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
Kendal	2.340.312	2.335.735	2.335.735	2.335.735	2.335.735	2.335.735
Batang	2.135.535	2.129.117	2.129.117	2.129.117	2.129.117	2.129.117
Pekalongan	2.094.646	2.084.155	2.084.155	2.084.155	2.084.155	2.084.155
Pemalang	1.940.890	1.926.000	1.926.000	1.926.000	1.926.000	1.926.000
Tegal	1.968.446	1.958.000	1.958.000	1.958.000	1.958.000	1.958.000
Brebes	1.885.019	1.866.723	1.866.723	1.866.723	1.866.723	1.866.723
Kota						
Magelang	1.935.913	1.914.000	1.914.000	1.914.000	1.914.000	1.914.000
Surakarta	2.035.720	2.013.810	2.013.810	2.013.810	2.013.810	2.013.810
Salatiga	2.128.523	2.101.457	2.101.457	2.101.457	2.101.457	2.101.457
Semarang	2.835.021	2.810.025	2.810.025	2.810.025	2.810.025	2.810.025
Pekalongan	2.156.213	2.139.754	2.139.754	2.139.754	2.139.754	2.139.754
Tegal	2.005.930	1.982.750	1.982.750	1.982.750	1.982.750	1.982.750

Berdasarkan data upah minimum kabupaten/kota yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Karesidenan Semarang yang terdiri dari 4 kabupaten yaitu Grobogan, Demak, Semarang, dan Kendal serta 2 kota yaitu Salatiga dan Semarang memiliki nilai upah yang cukup tinggi dibanding wilayah lain di provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut merupakan salah satu alasan penulis memilih karesidenan Semarang untuk menjadi objek penelitian. Alasan lain memilih wilayah karesidenan Semarang sebagai objek penelitian karena penulis ingin mengetahui bagaimana kinerja pemerintah setempat dalam meningkatkan keadaan ekonomi di karesidenan Semarang yang merupakan ibu kota dari provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur arah dan besaran pengaruh indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan PDRB per kapita terhadap upah minimum kabupaten/kota di karesidenan Semarang tahun 2017-2022.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel yaitu gabungan antara data *time series* dan data *cross section* dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak *E-views*. Data *time series* pada penelitian ini berupa perubahan selama kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2017-2022, sedangkan *cross section* yang digunakan yaitu sebanyak 4 kabupaten dan 2 kota di

Karesidenan Semarang Provinsi Jawa Tengah. Data yang diteliti meliputi data Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, PDRB per kapita, dan Upah Minimum Kabupaten/kota.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) Jawa Tengah.

### **Variabel Penelitian**

Upah Minimum Kabupaten/Kota (Variabel dependen) merupakan imbalan terendah yang diterima pekerja terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang diberikan pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut peraturan yang berlaku.

Indeks Pembangunan Manusia adalah sebuah indikator yang mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan manusia yang dapat mempengaruhi kemajuan berupa peningkatan taraf hidup atau memperbaiki mutu kehidupan baik secara material maupun spiritual.

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan jumlah persentase yang diperoleh dari jumlah orang yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapat pekerjaan tetapi belum berhasil menemukannya atau mendapatkannya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dapat digunakan untuk mengetahui penawaran tenaga kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan persentase perbandingan antara angkatan kerja dengan seluruh penduduk yang memasuki usia kerja.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan hasil nilai tambah yang dihasilkan seluruh unit usaha suatu daerah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Sedangkan PDRB per kapita merupakan PDRB suatu daerah yang dibagi dengan jumlah penduduk tersebut.

### **Spesifikasi Model Regresi**

Model ekonometrika dalam penelitian ini yaitu:

$$UMK_{it} = \beta_0 + \beta_1 Tpk_{it} + \beta_2 Tpt_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \beta_4 PDRB_{it}$$

Keterangan:

$\beta_0$ : Konstanta

Y: Upah minimum kabupaten/kota (Rupiah)

$\beta_1$ : Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)

$\beta_2$ : Tingkat pengangguran terbuka (%)

$\beta_3$ : Indeks pembangunan manusia

$\beta_4$ : Produk Domestik Bruto (PDRB) per kapita (Juta rupiah)

*i*: Jumlah observasi (Kabupaten/Kota) di Karesidenan Semarang

*t*: Periode (Tahun)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel yang dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM).

**Tabel 2.** Hasil Regresi CEM, FEM, dan REM

Variabel	Koefisien Regresi		
	CEM	FEM	REM
C	3060921	-11852687	-7895633
IPM	-26467,840	190517,000	136286,100
TPT	101284,700	59282,960	73295,540
TPAK	1902,558	-14115,300	-13153,290
PDRB Per Kapita	7161,303	4287,295	4339,374
R2	0,624	0,975	0,836
Adjusted R2	0,576	0,966	0,815
F-Statistic	12,879	110,751	39,600
Prob. F-Statistic	0,0000	0,0000	0,0000

### Uji Pemilihan Model

#### 1. Uji Chow

Cross Section F(5,26); Prob F(5,26)=0,000

Kesimpulan: Prob.F <  $\alpha$  (0,05), maka  $H_0$  ditolak, sehingga model terpilih adalah FEM

#### 2. Uji Hausman

Cross-section random  $X^2(4)=41,170$ ; Prob. $X^2(4)=0,000$

Kesimpulan: Prob. $X^2 < \alpha$  (0,05), maka  $H_0$  ditolak, sehingga model yang terpilih FEM

### Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) yang lebih tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hasil uji chow menggunakan *software E-views* disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Hasil Uji Chow

### Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

### Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	71.645932	(5,26)	0.0000
Cross-section Chi-square	96.953181	5	0.0000

$H_0$  pada uji chow menyatakan bahwa model terbaik adalah *Common Effect Model* (CEM), sedangkan  $H_A$  menyatakan bahwa model terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan Tabel 3. menunjukkan bahwa probabilitas *cross-section F* (0,000) <  $\alpha$  (0,05), maka  $H_0$  ditolak. Kesimpulannya, model terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

### Uji Hausman

Uji hausman dilakukan untuk menentukan model terbaik antara *Random Effect Model* (REM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) yang lebih tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hasil uji hausman disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4.** Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	41.170179	4	0.0000

$H_0$  pada uji hausman menyatakan bahwa model terbaik adalah *Random Effect Model* (REM), sedangkan  $H_A$  menyatakan bahwa model terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan Tabel 3. menunjukkan bahwa probabilitas  $\chi^2 (0,000) < \alpha (0,05)$ , maka  $H_0$  ditolak. Kesimpulannya, model terestimasi adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Berdasarkan hasil uji chow dan uji hausman menunjukkan bahwa model yang tepat digunakan pada penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

**Tabel 5.** Model Estimasi Terpilih (*Fixed Effect Model*).

Model terestimasi				
$UMK_{it}$	$= -11852687$	$+ 190517IPM_{it}$	$+ 59282,96TPT_{it}$	$- 14115,30TPAK_{it}$
		$+ 4339,30PDRB \text{ per Kapita}_{it}$		
	(0,0000)	(0,0000)	(0,0530)	(0,0473)
$R^2=0,975; DW=1,815; F=110,751; Prob.F=0,0000$				

### Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen Model Terestimasi FEM (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menganalisis tingkat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 6.** Hasil Uji t

Variabel	Koefisien	Sig. t	Kriteria	Kesimpulan
Indeks Pembangunan Manusia	190517,000	0,0000	< 0,05	Berpengaruh signifikan pada $\alpha = 0,05$
Tingkat Pengangguran Terbuka	59282,960	0,0000	< 0,05	Berpengaruh signifikan pada $\alpha = 0,05$
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-14115,300	0,0530	< 0,1	Berpengaruh signifikan pada $\alpha = 0,1$
PDRB per kapita	4287,295	0,0473	< 0,05	Berpengaruh signifikan pada $\alpha = 0,05$

Hasil uji  $t$  pada Tabel 6. menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan PDRB per kapita berpengaruh signifikan dan positif terhadap UMK di Karesidenan Semarang, sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh negatif terhadap UMK di Karesidenan Semarang.

#### Uji Eksistensi Model Terestimasi $FEM$ (uji $F$ )

Uji  $F$  digunakan untuk menganalisis pengaruh seluruh independen terhadap dependen secara eksis atau bersama-sama. Model penelitian ini terbukti eksis, terlihat dari Tabel 5. menunjukkan probabilitas  $F$ -statistik sebesar 0,0000 ( $< \alpha (0,05)$ ). Artinya secara bersama-sama, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan PDRB per kapita berpengaruh terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Karesidenan Semarang.

#### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi  $R^2$  digunakan untuk mengukur derajat kebaikan model atau seberapa baik model ekonometrik dalam menunjukkan variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen pada model. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada Tabel 5. sebesar 0,975 berarti bahwa 97,5% variasi Upah Minimum Kabupaten/Kota disebabkan oleh variasi Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan PDRB per kapita, sedangkan 2,5% lainnya disebabkan oleh variabel lain diluar model.

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh IPM terhadap UMK di Karesidenan Semarang**

Berdasarkan uji  $t$  pada Tabel 6. menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum kabupaten/kota, dengan nilai koefisien regresi sebesar 190.517 serta signifikan dengan nilai sig.  $t (0,0000) < \alpha = 0,05$ . Pola hubungan indeks pembangunan manusia dengan upah minimum kabupaten/kota adalah linier-linier, artinya apabila indeks pembangunan manusia meningkat sebesar 1 satuan maka upah minimum kabupaten/kota meningkat sebesar 190.517 rupiah. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Primadila & Asmara, 2022) yang menunjukkan hasil bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap upah minimum kabupaten/kota.

#### **Pengaruh TPT terhadap UMK di Karesidenan Semarang**

Berdasarkan hasil uji  $t$  pada Tabel 6. menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum kabupaten/kota, dengan nilai koefisien regresi sebesar 59282,960 serta signifikan dengan nilai sig.  $t (0,0000) < \alpha = 0,05$ . Pola hubungan tingkat pengangguran terbuka dengan upah minimum kabupaten/kota adalah linier-linier, artinya apabila tingkat pengangguran terbuka meningkat sebesar 1% maka upah minimum kabupaten/kota meningkat sebesar 59.282,960 rupiah. Hasil penelitian (Muzna Tangke et al., 2023) menyebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka dapat berkurang akibat peningkatan upah, karena meningkatnya upah dianggap mampu memenuhi kebutuhan pekerja.

### **Pengaruh TPAK terhadap UMK di Karesidenan Semarang**

Berdasarkan hasil uji  $t$  pada Tabel 6. menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap upah minimum kabupaten/kota dengan nilai koefisien regresi sebesar -14115,3. Pola hubungan tingkat partisipasi angkatan kerja dengan upah minimum kabupaten/kota adalah linier-linier, artinya ketika tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat sebesar 1% maka upah minimum kabupaten/kota akan menurun sebesar 14.115,3 rupiah. Hasil ini sejalan dengan penelitian (nurtiyas, 2016) yang menyebutkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap upah minimum kabupaten/kota.

### **Pengaruh PDRB per kapita terhadap UMK di Karesidenan Semarang**

Berdasarkan hasil uji  $t$  pada Tabel 6. menunjukkan hasil bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum kabupaten/kota dengan nilai koefisien regresi sebesar 4287,295 serta signifikan dengan nilai sig.  $t$  (0,0473)  $< \alpha = 0,05$ . Pola hubungan PDRB per kapita dengan upah minimum kabupaten/kota adalah linier-linier, artinya setiap kenaikan PDRB per kapita sebesar 1 juta rupiah akan meningkatkan upah minimum kabupaten/kota sebesar 4.287,295 rupiah.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan:

1. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Karesidenan Semarang tahun 2017-2022.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Karesidenan Semarang tahun 2017-2022.
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh negatif terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Karesidenan Semarang tahun 2017-2022.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Collyn Damanik, D., & Surianto Zalukhu, R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penetapan Besaran Upah Minimum Kota (UmK) Di Kota Pematangsiantar. *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 2614–7181. <https://doi.org/10.36985/ekuilmomi.v3i1.78>
- Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Muzna Tangke, D., Ilmiah Ekonomi, J., & Muzna Tangke, D. (2023). Dampak Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Maluku. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 18(1), 53–65. <http://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe>
- nurtiyas, febrika. (2016). Nalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Propinsi Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 5(2), 166–175.
- Primadila, B., & Asmara, K. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum Kota di Kota Banjarmasin. *Jurnal Media Wahana Ekonomi*, 19(1), 30–40. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index>
- Riyani, D., & Citra. (2020). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penetapan Upah Di Kabupaten Berautahun 2011-2019. *Eco-Build Journal*, 4(2), 44–54.

- Sari, R. (2013). Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia. *Jurnal EKonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 131–145. <http://wartaekonomi.co.id/berita7450/perburuhan-menjaga-keseimbangan-upahdan-produktivitas-bagian-ii.html>, diakses 20 Maret 2013
- Wihastuti Latri, H. R. (2018). Upah Minimum Provinsi (Ump) Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa. *Jurnal Gama Societa*, 1, 96–102.